

POLITIK GENDER DI INDONESIA



Editor AMALINDA SAVIRANI

Politik Gender di Indonesia

Politik Gender di Indonesia

**Amalinda Savirani
Endang Sulastri
Heroik Mutaqin Pratama
Linda Dwi Eriyanti
Rini Archda Saputri
Rofhani Rofhani
Dini Suryani**

**Editor:
Amalinda Savirani**

Politik Gender di Indonesia

Hak cipta @Polgov Media dan Publikasi, 2024

All rights reserved

Penulis: Amalinda Savirani, Endang Sulastri, Heroik Mutaqin Pratama, Linda Dwi Eriyanti, Rini Archda Saputri, Rofhani Rofhani, & Dini Suryani

Editor: Amalinda Savirani

Pemeriksa Aksara: Afifa Yustisia Firdasanti & Vitry Ayu Salsabilla

Desain Sampul: Galih Kartika

Desain Layout: Yohanes Paulus Mahadma Khrisna

Penyelaras Akhir: Vitry Ayu Salsabilla

Cetakan I, Juni 2024

xii + 284 hlm;

21 x 14 cm

ISBN: 978-623-10-1522-8

Diterbitkan oleh Penerbit Polgov Media dan Publikasi

Polgov Media dan Publikasi adalah lembaga yang mempunyai komitmen untuk bergerak melakukan penyebarluasan kajian, ide, gagasan terkait hasil penelitian dengan fokus kajian akademis, advokasi, dan praktikal terkait isu-isu politik dan pemerintahan serta menjadi lembaga yang menjembatani kesenjangan antara dunia intelektual dan masyarakat umum. Polgov Media dan Publikasi hadir memberikan ruang atau wadah untuk penyebarluasan karya tulis yang bersifat ilmiah dan populer, serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bagi individual juga membentuk jejaring. Menjadi lembaga dalam pengembangan keilmuan berbasis riset dan publikasi, Polgov Media dan Publikasi berusaha memanfaatkan teknologi sehingga dapat menghasilkan produk pengetahuan yang dapat dipublikasikan secara luas melalui layanan yang diberikan. Oleh karenanya dapat memberikan kebermanfaatan dan kontribusi bagi masyarakat luas terutama pada bidang politik dan pemerintahan.

Gang Turonggo II, No. 511 Jaranan, RT.003/ RW.004, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Website: polgovmediapublikasi.or.id

Telp/Fax: +62274-555880

Email: polgovmediapublikasi@gmail.com

Prakata

Salah satu tradisi penting di lembaga akademis seperti Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (DPP FISIPOL UGM) adalah merayakan purna tugas dosen atau peneliti dengan memproduksi karya akademik. Tentu saja, karya akademik tersebut biasanya mengambil tema yang sama dengan minat atau keahlian utama mereka yang sedang memasuki purna tugas itu. Buku yang sedang berada di tangan Anda ini, para pembaca, adalah salah satu bagian dari tradisi itu.

Kali ini, yang tengah kami rayakan adalah purna tugasnya Ibu Dr. Ratnawati, atau kami biasa panggil dengan sapaan “Bu Ratna”. Dalam beberapa tahun terakhir sebelum memasuki masa pensiun pada bulan Maret 2024, Bu Ratna menaruh minat serius terhadap kajian gender dan politik di Indonesia. Oleh karena itulah buku ini mengambil tema tersebut.

Penyusunan buku ini sejak masih sangat awal kami percayakan pada dosen DPP FISIPOL UGM yang di masa S1-nya dulu adalah mahasiswa bimbingan Bu Ratna, yakni Dr. Amalinda Savirani (Kepala Research Centre for Politics and Government, PolGov). Ini juga bagian dari tradisi di DPP yang terus kami rawat: menyediakan kesempatan bagi mantan mahasiswa bimbingan untuk berbakti

kepada dosen pembimbingnya dulu. Untuk itu, atasnama DPP saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Linda (begitu panggilannya) yang telah mendedikasikan waktu untuk merancang dan mengeksekusi buku ini hingga tuntas.

Saya juga menyampaikan terimakasih kepada para kontributor buku ini, yakni Dr. Endang Sulastri, Heroik Muttaqin Pratama, Dini Suryani, Dr. Linda Dwi Eriyanti, Rini Archda Saputri, dan Dr. Rofhani. Hampir semua penulis adalah alumni DPP, baik di prodi S1, S2, maupun S3.

Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan juga pada tim produksi buku ini, khususnya Afifa Yustisia Firdasanti (manajer PolGov), Vitry Ayu Salsabilla (penanggung-jawab publikasi akademik di PolGov), Galih Kartika (desainer sampul buku ini), dan Yohanes Mahadma Krishna yang telah membantu penyelesaian akhir buku ini.

Semoga buku ini bisa turut mewarnai perbincangan akademik di negeri ini.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Dr. Abdul Gaffar Karim
Ketua DPP FISIPOL UGM

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Gambar dan Tabel	xi
Pendahuluan Politik Gender di Indonesia: Menganyam Peluang dan Mengikis Tantangan	
<i>Amalinda Savirani</i>	1
1 Caleg Perempuan di Tengah Kekuatan Oligarki Partai Politik pada Pemilu 2014	
<i>Endang Sulastri</i>	29
Pengantar	29
Oligark dan Oligarki Partai Politik	32
Operasi Kerja Oligark Partai Politik dalam Proses Pemilu	42
Pertarungan Caleg Perempuan dalam Proses Kandidasi	45
Caleg Perempuan dalam Kampanye: Antara Keterbatasan Modal Caleg Perempuan dan Pragmatisme Pemilih	52
Ruang Perkelahian Caleg Perempuan dalam Proses Penghitungan Suara	62
Kesimpulan	64

2	Pembulatan ke Atas atau ke Bawah? Tantangan Institutional Keterwakilan Perempuan di Pemilu Serentak 2024	
	<i>Heroik Mutaqin Pratama</i>	69
	Pengantar	69
	Kilas Balik Kebijakan Kuota 30% Perempuan....	71
	Revisi Regulasi yang Progresif	80
	Pembulatan ke Bawah dan Langkah Mundur Kebijakan Kuota Perempuan	85
	Kesimpulan.....	94
3	Perspektif Feminis Liberal vs <i>Postmodern</i> dan Keterwakilan Politik Perempuan Formal di Indonesia	
	<i>Linda Dwi Eriyanti</i>	101
	Pengantar	101
	Pendekatan Feminis Liberal vs <i>Postmodern</i>	103
	Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen dan Pencapaiannya	110
	Kompleksitas Para Anggota Legislatif Perempuan	116
	Kesimpulan	124
4	Representasi Deskriptif Perempuan di Parlemen Indonesia: Refleksi Kritis	
	<i>Rini Archda Saputri</i>	141
	Pengantar	141
	Profil Perempuan Parlemen di Indonesia	147
	Kebijakan Pro Perempuan di Parlemen	152

Dinasti Politik Politisi Perempuan dan Tantangan Representasi Substantif	157
Fragmentasi Perspektif dan Kepentingan.....	162
Kesimpulan.....	170

5 <i>Female Subjectivity</i> dan Strategi Memenangkan Hati Pemilih Perempuan Caleg PKS Asal Kota Surabaya dalam Pemilu 2024	
<i>Rofhani Rofhani</i>	183
Pengantar	183
<i>Female Subjectivity</i> dalam Politik	186
“Perempuan Selalu untuk Perempuan”: Penggunaan Aspek Emosi dalam Menggalang Dukungan	190
Perempuan: Berperan Mulai Pagi Sampai Pagi	199
Stereotip Gender dan Tema-tema Utama dalam Operasi <i>Female Subjectivity</i>	206
Kesimpulan.....	209

6 Perempuan Adat di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Ilusi Inklusivitas	
<i>Dini Suryani</i>	221
Pengantar	221
Perempuan Adat dan Kota Inklusif: Sebuah Ikhtisar	225
Masyarakat dan Perempuan Adat di IKN	232
Eksklusi Politik Perempuan Adat dan Minimnya Partisipasi dalam Kebijakan IKN	235

Eksklusi Sosial Perempuan Adat: Ruang Hidup yang Terdesak.....	241
Respon Kelompok Perempuan Adat.....	252
Upaya Pemerintah untuk IKN yang Inklusif dan Ilusinya	255
Kesimpulan.....	257
Daftar Lampiran.....	269
Indeks	277
Biodata Penulis.....	281

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1.1	Penempatan Caleg Perempuan PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Berdasarkan Nomor Urut 1, 2, dan 3 di 77 Dapil	47
Tabel 1.2	Caleg Perempuan PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra Berdasarkan Nomor Urut.....	48
Tabel 1.3	Profil Caleg Perempuan PDI-Perjuangan dan Partai Gerindra yang Mendapatkan Nomor Urut 1	50
Tabel 1.4	Daftar 10 Caleg Penyumbang Dana Terbesar PDI-Perjuangan Pemilu 2024	56
Tabel 1.5	Daftar 10 Caleg Penyumbang Dana Terbesar Partai Gerindra Pemilu 2014	58
Tabel 1.6	Daftar 10 Caleg Penyumbang Dana Terendah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	59
Tabel 1.7	Daftar 10 Caleg Penyumbang Dana Terendah Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif Tahun 2014	61
Gambar 2.1	Perbandingan Kursi Keterwakilan Perempuan di DPR RI 1999-2019.....	72
Tabel 2.1	Model Kebijakan Kuota	75
Tabel 2.2	Keterwakilan Perempuan di Kepengurusan Partai Tingkat Nasional dan Provinsi di Pemilu 2024	76

Tabel 2.3	Daftar Calon Anggota DPR di Pemilu 2024 dengan Keterwakilan Perempuan Kurang dari 30%.....	78
Tabel 2.4	Pengaturan Kebijakan Afirmatif di Undang-Undang Partai Politik	80
Tabel 2.5	Pengaturan Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Undang-Undang Pemilu	83
Tabel 2.6	Keterpenuhan Kuota 30% Perempuan Berdasarkan Penghitungan KPU di Daerah Pemilihan	88
Tabel 2.7	Sebaran Keterwakilan Perempuan di Daerah Pemilihan di Tiga Pemilu Terakhir	91
Gambar 2.2	Keterwakilan Anggota DPR Berdasarkan Nomor Urut	93
Tabel 2.8	Nomor Urut Calon Anggota DPR Perempuan di Pemilu 2024 Berdasarkan Daftar Calon Tetap (DCT).....	94
Tabel 4. 1	Persentase Perempuan di DPR RI (1955-2019)	148
Gambar 4.1	Latar Belakang Caleg Perempuan Terpilih 2019.....	151
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Produk Legislasi DPR RI Terkait Isu Perempuan (1955-2024)	153
Gambar 6.1	Kerangka Konseptual Multidimensional Kota Inklusif.....	229

***Female Subjectivity* dan Strategi Memenangkan Hati Pemilih Perempuan Caleg PKS Asal Kota Surabaya dalam Pemilu 2024**

Rofhani Rofhani

Pengantar

Dalam panggung politik Indonesia, suara perempuan seringkali teredam di bawah dominasi gemah retorika maskulin. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi pergeseran dalam konteks pemilihan umum. Politik, arena yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, menawarkan tantangan unik bagi perempuan. Tantangan tersebut bukan hanya terkait dengan akses ke posisi kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana strategi perempuan dalam politik untuk menavigasi identitas mereka di ruang yang seringkali tidak menerima kehadiran mereka. Dalam konteks ini, subjektivitas perempuan atau *female subjectivity* bukan hanya menjadi refleksi diri, tetapi juga menjadi sebuah strategi politik yang efektif. *Female subjectivity* dalam diskusi feminis digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana perempuan

membangun identitasnya, memahami dan menafsirkan pengalamannya, serta bagaimana norma-norma gender mempengaruhi pengalamannya (Beauvoir dkk., 2011; Butler, 2006; Friedan, 2013). Fokus utama subjektivitas perempuan adalah mengamati identitas pengalaman pribadi perempuan dalam kehidupan kesehariannya membentuk cara pandangnya, terutama hubungan interpersonal dalam masyarakat. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana identitas perempuan merupakan sebuah kekuatan yang mendorong pengaruh politik dalam konteks pemilu 2024 di Kota Surabaya.

Kajian perempuan dalam politik tidak hanya persoalan kuota perempuan (Bauer, 2015a; Karpowitz dkk., 2017; Lawless, 2015; Thomsen & King, 2020; Wolak, 2015), tetapi juga ragam strategi kampanye yang mereka gunakan untuk memperoleh suara (Evans, 2022; Fox & Pate, 2023; Schneider, 2014). Di Indonesia, kajian tentang perempuan dalam setiap pemilu menjadi diskursus yang menarik dan ramai (Hidayat dkk., 2022; Prihatini, 2019b, 2019a, 2020; Putri, 2018; Ramadhany & Rahmawati, 2020). Dalam pemilu, khususnya pemilu 2024, merupakan momen menggali wawasan baru tentang bagaimana politik gender berperan dalam kampanye politik. Tulisan ini berfokus pada calon legislatif perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jawa Timur dan mengeksplorasi *female subjectivity* mereka yang digunakan dalam kampanye politik.

Calon legislatif perempuan PKS dalam kajian ini, tidak hanya strategi mereka menghadapi tantangan yang ada dalam sistem politik yang didominasi laki-laki, tetapi juga bagaimana mereka menggunakan identitas perempuan mereka justru sebagai sumber kekuatan dan strategi kemenangan. Perspektif dan pengalaman mereka sebagai perempuan adalah modal utama berkomunikasi untuk menarik suara.

Fokus utama tulisan ini adalah bagaimana calon legislatif perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Surabaya menggunakan isu kampanye terkait perempuan dengan target pemilih perempuan. Terpilih empat calon legislatif perempuan PKS, tiga orang caleg *incumbent*, dan satu caleg perempuan yang tiga kali pemilu (2014, 2019 dan 2024) sebagai caleg perempuan PKS. Selain wawancara dengan keempat caleg tersebut, akun Instagram dan Facebook mereka adalah data penting. Konten media sosial tersebut memperdalam analisis strategi mereka untuk memenangkan hati pemilih perempuan. Hal ini menegaskan bahwa *female subjectivity* dalam politik bukan hanya refleksi diri, tetapi juga sebagai alat politik untuk menarik simpati dan pikiran perempuan. Para caleg perempuan ini mengadopsi strategi kampanye yang memanfaatkan pemahaman mendalam tentang isu-isu yang secara khusus mempengaruhi perempuan, dengan menunjukkan empati melalui aspek emosi yang kuat, menopang posisi mereka sebagai perwakilan yang sah

atas kepentingan perempuan. Tulisan ini menunjukkan bahwa caleg perempuan mendapatkan keuntungan strategis ketika mereka mencalonkan diri 'sebagai perempuan' yang menekankan isu-isu yang dikaitkan dengan kehidupan dan kebutuhan pemilih perempuan.

Female Subjectivity dalam Politik

Dalam politik kontemporer, munculnya *female subjectivity* atau dikenal dengan subjektivitas perempuan berakar pada kapasitas perempuan dalam mengekspos dan mengeksplorasi dinamika kekuasaan yang seringkali disembunyikan untuk menyatakan peran penting perempuan dalam membentuk lanskap politik (Shams, 2020). Melalui perspektif subjektivitas, memberi peluang pada peneliti topik gender untuk memahami bagaimana latar belakang dan pemahaman perempuan sendiri dalam mengartikulasikan ide mereka, mengadvokasi perubahan sosial, dan menentang norma-norma yang berlaku dalam kultur patriarki. Dalam konteks ini, subjektivitas berkaitan dengan cara individu (perempuan) memahami dan mengekspresikan kemampuan mereka untuk memberikan pengaruh dalam kerangka sosial dan politik.

Pendekatan *female subjectivity* memungkinkan untuk lebih memahami dan menghargai ragam pengalaman perempuan dan keruwetan mereka dalam politik yang seringkali terdapat reduksi-reduksi narasi monolitik dan homogen (Kimmel, 2013). Ranah *female subjectivity* tidak hanya terbatas pada partisipasi

lembaga politik formal, tetapi mencakup bagaimana perempuan menavigasi identitas mereka dalam konteks dinamika kekuasaan dan menjalankan peran agensi mereka di situasi kuatnya dominasi nilai-nilai patriarki. Kerangka pemahaman yang mendalam tentang *female subjectivity* dalam politik memposisikan feminisme dan politik identitas sebagai landasan teoritis penting bahwa feminisme menawarkan cara penting untuk memahami dampak struktur kekuasaan yang berbasis gender pada partisipasi dan representasi perempuan dalam politik.

Konsep agensi dan subjektivitas memperkaya pemahaman tentang bagaimana perempuan melihat dan menanggapi struktur kekuasaan dalam konteks politik. Agensi berkaitan dengan kapasitas individu untuk bertindak secara mandiri dan membuat pilihan. Sementara itu, subjektivitas mencakup pengalaman internal serta cara individu memandang dan mengekspresikan diri mereka dalam ranah sosial (Campbell & Greenberg, 2024; Häkli & Kallio, 2018). Ironisnya, agensi dan subjektivitas perempuan sering dilihat sebagai perlawanan perempuan terhadap norma dan struktur patriarki, terutama pada otonomi dan pengakuan mereka dalam konteks politik.

Sementara itu, identitas politik menggarisbawahi adanya perbedaan pengalaman yang dihadapi oleh perempuan berdasarkan ras, kelas, orientasi seksual dan faktor identitas lainnya (Bernstein & Taylor, 2022; Gentry, 2018). Dalam konteks politik, interseksionalitas mengungkap bagaimana kebijakan dan praktik politik

dapat secara bersamaan mendukung dan meminggirkan perempuan dari berbagai latar belakang sehingga memerlukan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap keragaman pengalaman perempuan (Crenshaw dkk., 2019). Lebih tegasnya, pendekatan *female subjectivity* memfasilitasi artikulasi tentang bagaimana kebijakan dan praktik politik dapat meningkatkan atau bahkan menghambat aspirasi dan kebutuhan perempuan sehingga menyoroti pentingnya mengenali dan mewakili beragam pengalaman perempuan dalam proses pembuatan kebijakan atau isu-isu penting untuk memperoleh suara.

Pengalaman, sudut pandang, identitas pribadi perempuan dan bagaimana perempuan memandang diri mereka sendiri atau dunia sekitarnya adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Secara tegas perspektif *female subjectivity* melampaui nilai simbolisnya sebagai sarana representasi, yaitu mengambil peran sebagai landasan fundamental dalam perumusan strategi politik yang inklusif dan responsif terhadap beragam kebutuhan dan aspirasi pemilih perempuan. Penting untuk menggarisbawahi bahwa pemilih perempuan adalah salah satu penentu kunci keberhasilan calon legislatif perempuan. Calon legislatif perempuan sangat paham bagaimana mendekati dan menarik simpati pemilih perempuan. Selain pendekatan secara personal ataupun kelompok menjadi bagian taktik kampanye tradisional, isu-isu yang memiliki relevansi dan signifikansi dalam

kehidupan praktis perempuan, terutama tataran bawah (*grassroot*) berdampak pada pilihan politik pemilih perempuan. Hal ini mengemukakan pentingnya membina koneksi otentik dan inovatif yang memprioritaskan pembentukan dialog dan interaksi berkelanjutan dengan pemilih perempuan.

Dalam pemilu 2024 keberadaan dan keunggulan calon legislatif perempuan tidak dapat diabaikan atau diremehkan. Tidak banyak berbeda dengan Pemilu 2019 (Purwaningsih & Rubiyati, 2019), proses kampanye di pemilu 2024 ini, khususnya calon legislatif (Caleg) perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menawarkan perspektif khas yang memiliki potensi besar dalam memperoleh dukungan pemilih perempuan pada masa kampanye. Identitas PKS sebagai partai Islam yang konservatif adalah modal yang tidak bisa diabaikan untuk menggaet suara kelompok Islam 'kanan' terutama pada pemilu 2024. Partai ini mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden.¹ Sejalan dengan itu, adanya pergeseran pandangan PKS sebagai parpol yang terbuka dan usaha-usaha memoderasi pandangan ideologi Islam (Shihab & Nugroho, 2009) adalah modal lain yang tidak bisa diabaikan, terutama pada calon legislatif perempuan mereka. Keterlibatan langsung para caleg perempuan (terutama *incumbent*) dengan para pemilih setia atau calon pemilih perempuan dilakukan

1 Dimuat oleh Republika dalam artikel <https://news.republika.co.id/berita/s111sa377/sah-pks-resmi-dukung-pasangan-aniesmuhaimin>

melalui forum komunitas, pertemuan kecil, atau platform media sosial yang memungkinkan interaksi pribadi dan bermakna. Calon legislatif perempuan PKS yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mendengarkan dan secara efektif menanggapi kebutuhan pemilih perempuan mampu membangun kepercayaan dan kesetiaan dalam rangka mengumpulkan suara.

Keterlibatan perempuan pada isu pendidikan dan isu peningkatan ekonomi pada Usaha Kecil Menengah (UKM), memainkan peran utama dalam membentuk isu-isu politik yang lebih menarik karena mewakili kebutuhan dan aspirasi semua pemilih, terutama perempuan. Selain itu, penyajian kisah sukses yang menyoroti kontribusi perempuan terhadap politik dan masyarakat merupakan salah satu cara mereka melawan stereotip gender dan diskriminasi perempuan dalam berpolitik. Langkah-langkah calon legislatif perempuan PKS tersebut sebenarnya untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan mereka sebagai perempuan panutan yang menginspirasi bagi pemilih perempuan khususnya, dan komunitas yang lebih luas.

“Perempuan Selalu untuk Perempuan”: Penggunaan Aspek Emosi dalam Menggalang Dukungan

Preferensi dan perilaku pemilih merupakan komponen penting dalam menyusun strategi kampanye yang sukses, terutama dalam konteks pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-politik dan ekonomi. Di tengah persaingan politik yang semakin

ketat, dukungan suara perempuan menjadi target semua caleg, termasuk caleg laki-laki. Eksplorasi pilihan pemilih perempuan dalam pemilu mengungkapkan lapisan rumit kompleksitas strategi yang mencakup strategi mempengaruhi, menarik perhatian, serta menggunakan strategi yang beresonansi dengan nilai-nilai dan kepentingan perempuan secara langsung. Hambatan budaya masih menjadi faktor penentu preferensi dan kekhawatiran pemilih perempuan (Norris & Inglehart, 2001). Selain itu, keterlibatan aktif pada kegiatan masyarakat dan jaringan sosial yang dibangun sejak dulu oleh para caleg perempuan adalah salah satu faktor penentu yang sangat penting dalam meningkatkan visibilitas dan kredibilitas para caleg di mata pemilih (Sanbonmatsu, 2003).

Pada pemilu 2024 ini, dari 18 partai politik peserta pemilu, hanya PKS yang memenuhi persyaratan kuota keterwakilan perempuan 30%.² Klaim ini diperkuat oleh Ketua DPP PKS Kurniasih Mufidayati yang mengatakan bahwa, "sebagai partai politik, PKS serius dalam menyiapkan kepemimpinan, termasuk dalam hal kepemimpinan perempuan sebagai caleg."³ Menjadi semakin menarik, PKS mendaftarkan calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 538 calon

2 Sebagaimana yang diberitakan Databoks dalam artikel <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/15/netgrit-hanya-pks-yang-penuhi-kuota-30-perempuan-dalam-dct-2024>.

3 Dimuat oleh Antara News dalam artikel <https://www.antaranews.com/berita/3817650/pks-klaim-parpol-yang-penuhi-kuota-perempuan-calon-anggota-dpr-ri>.

anggota legislatif tingkat untuk DPR RI (80 dapil), dengan komposisi 326 caleg laki-laki dan 212 caleg perempuan.⁴ Angka yang secara cepat mengingatkan publik akan *spirit* peristiwa 212, di mana PKS berperan sentral.⁵ Identitas politik tidak bisa dihindari oleh partai ini, meskipun secara eksplisit PKS menyatakan sebagai partai terbuka. Mengembangkan dan mempromosikan kebijakan yang secara khusus ditargetkan terhadap perempuan adalah aspek mendasar dari strategi kampanye yang sukses. Sangat penting bagi calon legislatif perempuan PKS untuk dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan terperinci tentang bagaimana program dan kebijakan mereka akan secara efektif mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan di Surabaya.

Pemanfaatan subjektivitas perempuan telah terbukti secara empiris efektif dalam membina hubungan dengan konstituen perempuan. Para caleg perempuan mengandalkan elemen subjektif dari pertemuan perempuan, seperti mengaitkan peran perempuan dalam kehidupan keluarga dan mengaitkan rutinitas sehari-hari para perempuan. Para caleg juga menggunakan kegiatan sosial untuk membangun rasa keterkaitan dengan pemilih perempuan. Kelompok pengajian ibu-ibu menjadi

4 Dimuat oleh Kompas dalam artikel <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/18/05300221/pks-ungkap-jumlah-caleg-perempuan-212-orang>

5 Dimuat oleh RM Community dalam artikel <https://rm.id/baca-berita/parpol/724/kader-ikut-turun-pks-klaim-aksi-reuni-212-bisa-naikin-elektoral-partai>

sasaran utama para caleg perempuan PKS, sembari tetap menjalin hubungan dengan para kader perempuan PKS. Sebagai partai kader yang awal berdirinya dari kelompok Tarbiyah, tentunya caleg PKS dengan mudah menghimpun basis dukungan dari kelompok mereka sendiri (Permata, 2016).

Keterlibatan caleg perempuan yang berlatar sebagai konsultan pendidikan Islam adalah modal utama Aning Rahmawati, salah satu *incumbent* anggota DPRD Kota dari dapil 3 Kota Surabaya. Pada pemilu 2024 ini, ia kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Surabaya. Motivasi Aning tidak berbeda dengan pencalonannya pada pemilu 2019. Menurut Aning, hanya perempuan yang mampu memahami kebutuhan perempuan.⁶ Pemimpin perempuan dibutuhkan untuk mendorong kebijakan publik pro perempuan. Strategi kampanye lima tahun lalu yang membawa kesuksesannya meraih kursi DPRD, ia gunakan lagi, yaitu menyuarakan isu-isu perempuan dan menggunakan sisi emosional yang menyentuh hati perempuan.

Penggunaan kata "Bunda Aning"⁷, atau juga sering disingkat dengan kata "bunA" untuk penyebutan dirinya, mempertegas dan mengingatkan kembali kepada para konstituennya akan latar belakangnya sebagai seorang konsultan pendidikan dan motivator

⁶ Wawancara dengan Aning Rahmawati di Surabaya, 17 Januari 2024.

⁷ <https://www.instagram.com/p/CuKs7KzBWfW/> (Diakses, 19 Januari 2024)

pada acara parenting di sekolah-sekolah SDIT (Sekolah Dasar Islam Terpadu). Penyebutan “bunda” memiliki makna yang dianggap lebih baik daripada kata “ibu”, dengan tekanan rasa cinta dan kasih sayang, dan dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat religius, seperti ketaatan pada Allah, rajin berdoa, mendedikasikan pada umat, dan sebagainya (Sugeha & Nurfarida, 2016). Penyebutan “bunda” dengan panggilan singkat “bun” yang merupakan istilah *gaul*, menjadikannya lebih dekat dan akrab dalam kultur pendidikan tingkat dini dan dasar. Batasan dan formalitas panggilan dihilangkan oleh Aning yang mencoba mempermudah ingatan para konstituen, terutama perempuan.

Sebagai anggota DPRD komisi C tahun 2019-2024, tidak begitu sulit baginya untuk memperkenalkan diri pada konstituen daerah pilihannya. “Semoga diterima dengan cinta dan dengan hati, kalau sudah dengan hati semua dilakukan dengan cinta.”⁸ *Tagline* kampanye, menggunakan istilah “cinta” dan “hati,” dan penyampaian gagasan komunikasi mengandung emosi dan mendukung nilai-nilai kemanusiaan. Penggunaan istilah “cinta” mengacu pada kasih sayang, perhatian, dan perhatian yang mendalam, sementara istilah “hati” menggambarkan intensitas sentimen dan ketulusan. Perpaduan kedua kata ini menghasilkan pesan yang

8 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Lmh9f6LXb21ixmSYaAjX2xQf1FuPAADAFB5LMKDTpvPJGagJLiL9Jtj4Zjwrvnrldl&id=1357677287&mibextid=w8EBqM. (Diakses, 19 Januari 2024)

konstruktif dan menginspirasi, memperluas undangan kepada individu untuk bertindak dengan cinta, perhatian, dan keterusterangan. Singkatnya, *tagline* tersebut dapat ditafsirkan sebagai permohonan untuk berkomunikasi dengan cinta dan ketulusan, pada saat yang sama juga mencakup sentimen emosional dalam setiap tindakan dan keputusan yang dibuat.

Pendekatan emosional Aning dengan kalimat “sayangi rakyat sepenuh hati” tidak hanya disampaikan dalam alat peraga kampanye seperti baliho ataupun spanduk kecil, tetapi juga akun media sosial (Instagram dan Facebook) pada saat kampanye Aning. Kalimat ini selalu menjadi salam pembuka dan kalimat penutup pembawa acara pada saat Aning kampanye di hadapan konstituennya. Bagi Aning kalimat tersebut dianggap tepat sebagai pemimpin perempuan. Sapaan yang terkesan akrab untuk masyarakat Surabaya yang mempunyai pemimpin perempuan yaitu Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya 2010-2020) dan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur 2019-2024). “Bagi orang Surabaya, perempuan menjadi pemimpin publik sudah lumrah.”⁹ Stereotip gender pada kandidat perempuan menjadi senjata yang menguntungkan. Para caleg perempuan memiliki keahlian dalam mengemas isu-isu kampanye yang sesuai dengan peran sosial yang secara tradisional dipegang perempuan (Alexander & Andersen, 1993; Rosenwasser dkk., 1987). Stereotip

9 Wawancara dengan Aning Rahmawati di Surabaya, 17 Januari 2024.

feminin lebih ditonjolkan caleg perempuan, yaitu mencirikan perempuan sebagai sosok yang peduli, sensitif, dan lemah, serta lebih cenderung terlibat dalam perilaku yang mendukung dan berbelas kasih (Prentice & Carranza, 2002). Isu-isu pendidikan dan kebijakan sosial mencerminkan bahwa pemimpin (pemerintah) mengambil peran “welas asih” dan “pengasuhan”. Hal ini mencerminkan peran komunal perempuan.

Hal yang sama dilakukan oleh caleg PKS lain yakni Eny Minarsih. Eny gagal pada pemilu 2019 dan ini menjadi pelajaran baginya untuk mencari pendekatan lain kepada konstituen. Pada pemilu 2024 ini, Eny Minarsih mendapatkan nomor urut pertama dari PKS di Dapil 4 Surabaya. Sebagai pemilik Children Daycare di wilayah Surabaya Timur dan Surabaya Selatan, Eny Minarsih cukup dikenal para pasangan muda yang menitipkan anak-anaknya. Usaha lain yang dimiliki caleg perempuan PKS ini adalah salon kecantikan khusus Muslimah. Bisnis-bisnis tersebut adalah salah satu sarana untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan diri kepada perempuan, dan memperluas jaringan sosialnya, dan ia gunakan lagi pada pemilu 2024.

Seperti halnya Aning, Eny menggunakan *tagline* yang tidak jauh berbeda. Diksi “hati” adalah kata kunci untuk menyentuh aspek keperempuanan. Penggunaan salam “satu, satu, satu, selalu di hati” menurut Eny, memudahkan konstituen, mulai dari yang usia paling muda sampai dengan yang tua, agar mengingatnya.

Kata "satu" yang pertama menunjukkan nomor urutnya, kata "satu" yang kedua merujuk pada PKS yang mengusung pasangan capres nomor satu, dan kata "satu" yang ketiga menunjukkan dapilnya.¹⁰ Bahasa tubuh dengan isyarat kedua tangan yang membentuk hati pada baliho, spanduk ataupun sosial media Eny, mengingatkan kembali bahwa ciri *female subjectivity* yang selalu dinarasikan oleh caleg perempuan. Gambar tersebut juga menegaskan bahasa tubuh dalam iklan politik terkait dengan stereotip gender: para caleg laki-laki menggunakan kepalan tangan yang menunjukkan ketegasan dan keberanian, dan tidak sama dengan para caleg perempuan (Neumann dkk., 2022). Bahasa tubuh Eny dalam alat peraga kampanyenya berciri emosional, cermin pengalaman kesehariannya sebagai pemilik *daycare* dan salon kecantikan. Perempuan sebagai target utama pemilih untuk memenangkan dirinya. Komunikasi yang dibangun melalui media sosialnya¹¹ menunjukkan bentuk strategi pendekatan kepada sesama perempuan.

Kolaborasi dengan organisasi perempuan terutama kelompok pengajian perempuan, seperti yasinan dan tahlilan dipahami oleh Eny sebagai ceruk perolehan suara yang potensial. Perkumpulan pengajian di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) merupakan jaringan komunitas yang kuat dan strategis

10 Wawancara dengan Eny Minarsih di Surabaya, 13 Januari 2024.

11 <https://www.instagram.com/p/CvZlymfrpIC/> (Diakses 12 Januari 2024)

untuk mendalami isu-isu lokal. Aset yang sangat penting untuk melibatkan dan memobilisasi pemilih perempuan. Potensi tersebut terbaca oleh Eny sehingga penguatan identitas keagamaan menjadi hal utama bagi Eny. Penulisan dan penyebutan Hajjah (Hj.) di depan namanya merupakan salah satu usahanya memperoleh kepercayaan pada kelompok pengajian. Kader PKS lain jarang menggunakan simbol haji/hajjah ini, meskipun PKS dianggap sebagai partai dengan identitas Islam (Miichi, 2023). *Personal branding*, seperti menggunakan judul "Hajjah" atau istilah "Bunda," membantu kandidat seperti Eny dan Aning untuk menarik nilai-nilai agama dan keluarga, yang dapat berpengaruh untuk mendapatkan kepercayaan pemilih.

Pengalaman subjektif perempuan ini menjadi fondasi utama dalam merancang kampanye Aning dan Eny sebagai calon legislatif. Ikatan emosional yang kuat dengan pemilih perempuan menumbuhkan kepercayaan sekaligus dukungan politik yang kuat. Dalam konteks ini sangat penting untuk mendengarkan, memperhatikan, dan menginternalisasikan narasi kehidupan pribadi perempuan menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam memahami komunitas (konstituen) yang beragam. Sebagai calon yang mewakili perspektif perempuan, memahami sudut pandang individu mereka tidak hanya menghasilkan pengakuan atas berbagai pengalaman yang dihadapi oleh perempuan, tetapi juga membangun

hubungan pemahaman yang kuat antara calon legislatif dan pemilih, terutama pemilih perempuan.

Perempuan: Berperan Mulai Pagi Sampai Pagi

Dua caleg *incumbent* PKS lainnya, Reni Astuti dan Lilik Hendarwati sedikit berbeda pendekatannya dengan konstituen yang sudah dibangun lima tahun lalu. Kedua caleg perempuan PKS ini menekankan bahwa perempuan mempunyai kemampuan seperti laki-laki dalam memimpin. Pada pemilu 2024, kedua *incumbent* ini kembali ditunjuk oleh PKS sebagai calon legislatif. Partai menempatkan Reni pada nomor urut kedua untuk caleg DPR-RI sedangkan Lilik Hendarwati di nomor urut satu untuk DPRD Provinsi.

Reni adalah wakil ketua DPRD Surabaya 2019-2024. Sebagai anggota dewan selama tiga kali pemilu mulai 2009 sampai sekarang, tentunya cukup dikenal konstituennya dan juga warga Surabaya pada umumnya. Menelisik akun sosial medianya terutama di Instagram, komunikasi dan *branding* diri yang dibangun Reni tidak hanya komunikasi dan kedekatannya dengan perempuan saja.¹² Ini juga menunjukkan bagaimana dia menggunakan media sosial dan kata-kata khusus untuk menciptakan citra yang ramah dan terpercaya.

Meskipun demikian, secara tidak langsung Reni juga menggunakan aspek subjektivitas perempuan sebagai sarana pengembangan komunikasi politiknya. Kampanye

¹² https://www.instagram.com/reniastuti_surabaya/?hl=en. (Diakses, 22 Januari 2024)

Reni pada pemilu 2024 ini tidak banyak perubahan pada saat pemilu 2019. Perempuan bukan target utama yang disasar oleh Reni, tetapi alat kampanye yang digunakan oleh Reni selalu mengingatkan kepada aspek-aspek domestik yang ditujukan kepada perempuan. Pada pemilu 2019, Reni menggunakan pisau kecil sebagai souvenir yang dibagikan pada konstituen saat kampanye (Rofhani & Fuad, 2021) sedangkan pada pemilu 2024, Reni menggunakan mug. Menurut Reni, "mug ini serba guna dan dipakai oleh semua usia, bisa untuk *ngopi*, untuk bapak-bapak terutama atau untuk *ngeteh* bagi ibu-ibu. Alat minum ini pasti diletakkan di meja makan atau dapur, tempat *jujukan* anggota keluarga."¹³

Sama dengan dengan para caleg perempuan PKS lainnya, Reni menggunakan diksi bernuansa emosional dengan kata "*#sayangiRakyat*". *Tagline* tersebut menjelaskan narasi tentang dirinya sebagai perempuan, bahwa perempuan mempunyai kepekaan perasaan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Subjektivitas perempuan terlihat pada kesan ekspresif untuk menarik perhatian kepada konstituen yang tidak begitu perhatian pada isu-isu politik. Strategi kampanye politik seperti ini sangat menguntungkan bagi caleg perempuan. Mereka memahami bahwa konstituen yang kurang peduli pada isu-isu politik formal cenderung menilai caleg perempuan berdasarkan stereotip (Bauer, 2015b). Terlepas dari manfaat perwakilan perempuan,

13 Wawancara dengan Reni Astuti di Surabaya, 21 Januari 2024.

perempuan menghadapi hambatan yang signifikan dalam dunia politik, termasuk stereotip gender dan kurangnya dorongan, sehingga dianggap kurangnya representasi mereka di ranah politik (Lawless, 2015).

Bagi Reni, titik tekan perolehan suara tidak hanya dari pemilih perempuan, mengingat dia sebagai anggota dewan yang mempunyai kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan yang juga mencakup laki-laki. Nomor urut Reni sebagai caleg di urutan kedua untuk kursi DPR-RI pada Pemilu 2024 ini membutuhkan upaya yang berlapis dan menyebabkan tidak mudah baginya meraih kursi tersebut. Reni menegaskan, bahwa di Pemilu 2024 ia mendapat tantangan yang tidak mudah untuk memperoleh target suara yang diharapkan. "Semua harus saya dekati, bukan hanya perempuan. Anak, ibu atau bapak dalam keluarga bisa mempengaruhi anggota keluarga dalam rumah tersebut."¹⁴

Strategi lain berupa melibatkan pemilih perempuan dalam proses dialog kebijakan yang perlu diutamakan untuk hal-hal yang penting bagi mereka dan mendorong pemilih perempuan merasa berpartisipasi langsung dalam memikirkan kebijakan untuk kepentingan mereka. Caleg perempuan tidak hanya memvalidasi pentingnya subjektivitas perempuan, tetapi juga menumbuhkan rasa memiliki dan keterlibatan pemilih perempuan dalam proses politik. Pendekatan ini dapat menciptakan dan mengembangkan sebuah solusi

¹⁴ Ibid.

yang lebih kreatif dan inklusif yang mewakili beragam pengalaman dan kebutuhan pemilih perempuan. *Tagline* atau jargon Reni, "15 tahun di DPRD Kota Surabaya Ngapain aja?"¹⁵ mengkomunikasikan bagaimana rekam jejak kontribusinya sebagai anggota legislatif, sebuah *branding* diri untuk pemenangannya menuju DPR RI. Kampanye-kampanye Reni yang selalu mencerminkan ikatan emosional dengan pemilih perempuan menegaskan bahwa aspek perempuan dan keberpihakan kepada perempuan sebagai modal utama strategi pemenangannya.

Lilik Hendarwati adalah *incumbent* DPRD Provinsi Jawa Timur dan mempunyai kesamaan pandangan dalam menanggapi pekerjaan perempuan pada ranah domestik (rumah). Pekerjaan ini menurutnya tidak memiliki jam kerja yang pasti, dimulai dari pagi sampai dengan pagi lagi. Juga tanpa bayaran. Mereka sepakat bahwa perempuan harus kuat dan harus ada undang-undang atau kebijakan yang berpihak dan membela perempuan.¹⁶ Pada Pemilu 2024 ini, PKS menunjuk Lilik sebagai caleg PKS untuk DPRD Provinsi dengan nomor urut 1 (satu).

Menurut Lilik, hubungan erat dengan konstituen perempuan di masa Covid semakin intens. Melemahnya perekonomian di masa pandemi COVID-19 mengharuskan perempuan (ibu rumah tangga) terlibat

15 <https://www.instagram.com/reel/C0fX4NLB7vu/?igsh=MTY3NTQwd2NsNDhqMQ==> (Diakses 25 Januari 2024)

16 Wawancara dengan Reni Astuti di Surabaya, 21 Januari 2024 dan Lilik Hendarwati di Surabaya, 7 Januari 2024.

dan hadir mempertahankan kondisi ekonomi keluarga. Mempermudah dan melakukan pendampingan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah salah satu strateginya memobilisasi suara perempuan. Strategi ini menarik bagi perempuan yang memiliki kemampuan usaha, tetapi memiliki jaringan informasi yang terbatas. "Saya selalu berusaha bersama mereka, perempuan mudah didekati dengan memperhatikan apa yang mereka butuhkan dan mereka rasakan."¹⁷ Pendekatan ini memberikan wacana baru yang lebih komprehensif, partisipatif, dan substantif untuk memperkuat posisi caleg dalam proses pemilu tetapi juga mengarah pada transformasi yang lebih luas dalam keterlibatan perempuan di ranah politik. Selain itu, kelompok UKM perempuan memiliki potensi untuk secara signifikan mempengaruhi perkembangan politik yang lebih mudah beradaptasi dan mengadvokasi persyaratan dan ambisi semua pemilih, terutama perempuan.

Strategi kampanye yang lebih menonjolkan keberpihakan kepada perempuan dapat memengaruhi pandangan konstituen tentang kualifikasi calon legislatif perempuan lebih peduli dan berorientasi pada keluarga daripada laki-laki (Bauer, 2015a). Stereotip feminin yang mendeskripsikan karakter caleg perempuan sebagai sosok yang hangat, penuh kasih sayang, dan sensitif bertolak belakang dengan asumsi bahwa seorang

17 Wawancara dengan Lilik Hendarwati di Surabaya, 7 Januari 2024.

calon legislatif harus *blak-blakan*, tegas, dan agresif (Eagly & Karau, 2002).

Baliho dan stiker kampanye Lilik Hedarwati, selain *tagline* yang memakai bahasa daerah *Suroboyoan* yang lugas, juga menggunakan simbol jari 'saranghaeyo'¹⁸, dan memperlihatkan upaya Lilik mendekat pada pemilih kelompok milenial (kelompok muda) yang jumlahnya 55% pada Pemilu 2024. Teknologi data dan analitik memainkan peran penting dan memungkinkan kandidat untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan kebutuhan spesifik sub-kelompok pemilih pemuda. Mengingat keragaman pemilih, para caleg perempuan menyesuaikan komunikasi berdasarkan target grup masing-masing, seperti usia, gender, latar belakang sosial ekonomi, dan isu-isu spesifik dapat meningkatkan relevansi dan resonansi pesan serta strategi kampanye. Pendekatan yang tersegmentasi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kampanye, tetapi juga menunjukkan komitmen caleg untuk memahami dan melayani kebutuhan unik para pemilihnya.

Meskipun pada beberapa akun instagram Lilik¹⁹ terkesan ada usaha menekan stereotip maskulin, tetapi subjektivitas perempuan masih menonjol. Menekankan stereotip maskulin dapat mempengaruhi pengambilan

18 Sebagaimana diberitakan oleh Liputan 6 dalam artikel <https://www.liputan6.com/hot/read/4991663/saranghae-artinya-aku-mencintaimu-ketahui-makna-dan-contoh-penggunaannya>

19 <https://www.instagram.com/lilikendarwati/?hl=en> (Diakses 19 Januari 2024)

keputusan pemilih tentang kandidat perempuan dan laki-laki dapat meningkatkan kualifikasi kepemimpinan caleg perempuan ataupun caleg laki-laki (Bauer, 2018; Sanbonmatsu, 2003). Media sosial bertindak bukan hanya sebagai metode penyebaran informasi, tetapi juga sebagai panggung dialog, partisipasi, dan pembentukan komunitas (Evans, 2022; Herrick, 2016). Strategi penekanan subjektivitas perempuan dimanfaatkan oleh caleg perempuan PKS dan secara efektif mereka menggunakan kanal media sosial untuk berbagi cerita pribadi, pengalaman, dan bahkan tantangan yang mereka hadapi sebagai perempuan dalam politik. Penyajian narasi mereka relevan, menginspirasi, selalu terlibat dalam komunikasi dua arah dengan pemilih, menunjukkan empati dan dedikasi untuk mewakili suara mereka.

Demikian juga dengan metode komunikasi berbagi cerita dari pengalaman para caleg yang *relate* secara langsung dengan konstituen dan menyoroti kisah nyata dari perempuan yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjelaskan isu-isu kebijakan atau merayakan keberhasilan hasil perjuangan mereka sebagai caleg, dan menumbuhkan solidaritas. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional antara caleg perempuan dengan pemilih, tetapi juga menegaskan dan menggarisbawahi pentingnya suara perempuan dalam membentuk masa depan politik yang lebih inklusif. Pada akhirnya, strategi *female subjectivity* yang dengan sengaja digunakan oleh caleg perempuan

PKS untuk menarik hati pemilih, terutama pemilih perempuan memberikan hasil yang tidak mengecewakan. Keempat caleg perempuan PKS tersebut mendapat suara yang signifikan dan memenangkan pemilu 2024 ini.²⁰

Stereotip Gender dan Tema-tema Utama dalam Operasi *Female Subjectivity*

Uraian pengamatan subjektif di atas telah mengungkapkan hubungan yang sangat kompleks dengan stereotip gender yang dibangun atas dasar asumsi sosial tentang perbedaan-perbedaan yang inheren antara perempuan dan laki-laki, dan sering disebut sebagai pendekatan feminis liberal. Konstruksi sosial gender yang mencakup standar, tanggung jawab, dan antisipasi yang melekat dalam identitas gender seseorang, memainkan peran penting dalam membentuk pengamatan subjektif individu. Identitas gender mempengaruhi cara individu memandang, memahami, dan bertindak dalam kehidupan. Persepsi diri, peran sosial, dan harapan serta ambisi individu berkontribusi pada aspek subjektif mereka (Chang, 2011; Shelton, 2023).

Sebagaimana telah digambarkan di atas, peran perempuan dalam keluarga, tantangan karier, isu kesejahteraan sosial yang menjadi urusan perempuan, dan peran perempuan sebagai penyokong ekonomi keluarga adalah tema sentral kampanye para caleg

20 Sebagaimana diberitakan oleh Jawa Pos dalam artikel <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014449156/wajah-wajah-perempuan-yang-diprediksi-duduk-di-dprd-surabaya-suara-tertinggi-dari-pks-aning-rahmawati>

perempuan PKS. Dengan mengakui dan memperkuat *female subjectivity*, kampanye caleg perempuan PKS memperjuangkan transformasi positif dalam pembuatan keputusan legislatif yang lebih adil dan inklusif, dengan mengaitkannya pada identitas gender mereka sendiri termasuk stereotip-nya. Aspek subjektif menjadi sangat penting, caleg perempuan PKS mengkaitkan diri mereka dengan perempuan, yaitu tentang keluarga, kehidupan sehari-hari, dan isu-isu sentral yang dihadapi oleh para perempuan. Dalam konteks ini para caleg menggambarkan diri mereka sebagai figur yang sangat memahami dan mewakili kepentingan keluarga serta mampu menangani isu-isu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari yang dihadapi perempuan.

Pengalaman kehidupan sehari-hari adalah cara lain yang digunakan caleg perempuan PKS berkampanye untuk menciptakan hubungan yang dekat dengan pemilih perempuan dalam rangka membangun kepercayaan dan dukungan politik. Para caleg berusaha menjembatani dan memecahkan kesenjangan yang ada di masyarakat. Dalam kasus UMKM (dimana perempuan banyak berperan), salah satu caleg menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pengusaha. Kunjungan ke pasar tradisional pada saat kampanye dengan membagikan kalender adalah salah satu cara mereka memahami kebutuhan konstituen. Demikian juga, dialog interaktif dengan calon pemilih atau kegiatan reses terutama untuk

para *incumbent*, mereka memanfaatkan untuk berbicara tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi perempuan dalam mengelola dua wilayah sekaligus: domestik (peran di keluarga) dan di publik (peran di kehidupan sosial). Selain menggambarkan pengalaman pribadi mereka, para caleg perempuan secara empati menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kesenjangan upah, harga kebutuhan pokok sehari-hari yang terkadang tidak menentu, akses layanan publik, dan layanan kesehatan.

Tema kampanye lain adalah isu kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan makin marak di Indonesia dan relevan dengan konstituen perempuan yang memiliki anak. Pesan kampanye yang dibawa caleg perempuan adalah kebutuhan akan program kesejahteraan sosial untuk melindungi anggota masyarakat yang paling rentan. Dalam setiap interaksi, para caleg perempuan mengubah narasi yang menggambarkan perempuan sebagai korban, menjadi narasi yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai kontribusi dan potensi dalam semua bidang kehidupan. Para caleg juga mendorong jaringan dan solidaritas dari dan untuk perempuan. Pada akhirnya, kampanye ini bukan hanya tentang memenangkan kursi legislatif, tetapi menunjukkan keberpihakan kepada perempuan. Hal ini dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk

kesetaraan gender dan keadilan sosial. Pengalaman subjektif dan memanfaatkan kekuatan stereotip gender secara positif dalam berkampanye, kampanye ini membuka jalan bagi perubahan nyata dan signifikan dalam cara masyarakat memandang dan menghargai peran serta kontribusi perempuan.

Kesimpulan

Tulisan ini menggali bagaimana para caleg perempuan PKS menggunakan subjektivitas keperempuanan mereka dalam materi-materi dan strategi kampanye mereka. Ketimbang melawan ketimpangan gender dengan melawan stereotip perempuan yang merupakan semangat dari ideologi feminis liberal, para caleg justru menggunakan stereotip tersebut dalam kegiatan kampanye dan memobilisasi dukung dari konstituen. Bentuk penggunaan subjektivitas keperempuanan tersebut adalah penggunaan pengalaman kehidupan sehari-hari para caleg perempuan PKS. Pada Pemilu 2024 ini, kebanyakan mereka menyoroti isu-isu kritis yang selalu dihadapi perempuan, seperti isu pemberdayaan ekonomi perempuan, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan anak. Mereka membangun kepercayaan dan dukungan politik dengan pemilih terutama perempuan melalui cerita dan pengalaman pribadi.

Selain mengoptimalkan subjektivitas perempuan, para caleg juga menggunakan simbol-simbol populer dan terkini yang dapat dilihat dari akun media sosial, seperti di Instagram dan Facebook. Foto-foto mereka menggunakan

gaya yang langsung *relate* dengan para calon pemilih perempuan. Di sana pula para caleg perempuan berbagi narasi kehidupan pribadi mereka dan berinteraksi secara virtual dengan calon pemilih.

Para caleg perempuan juga mengoptimalkan kelompok perempuan dan jaringan komunitas sebagai target utama mereka untuk memobilisasi pemilih perempuan. Oleh karena itu, *personal branding*, seperti menggunakan gelar “Hajjah” atau istilah “Bunda,” citra khusus untuk diri mereka sendiri tersebut mengingatkan pemilih tentang nilai-nilai agama dan keluarga. Meskipun pada satu sisi caleg perempuan masih belum maksimal mengatasi stereotipe gender di masyarakat, tetapi strategi kampanye mereka menegaskan bahwa subjektivitas perempuan dan kontribusi perempuan adalah kunci penting untuk membentuk politik perempuan yang inklusif dan berkelanjutan.

Semua caleg perempuan PKS yang dibahas, berhasil mendapatkan kursi. Artinya, penggunaan strategi *female subjectivity* tampaknya efektif dalam kemenangan caleg perempuan. Namun, di tengah maraknya politik uang, satu strategi pemenangan selalu perlu dikombinasikan dengan strategi lain. Terlepas dari itu, tulisan ini memperlihatkan bahwa agenda penguatan gender selalu memiliki konteks yang spesifik, dan tidak selalu seiring dengan pendekatan feminis liberal. Hal ini disebabkan para perempuan memiliki *agency* dan

subjektivitas mereka sendiri yang adaptif dengan kondisi dimana mereka berada. Dalam konteks ini adalah upaya menang dalam pemilu.

Daftar Pustaka

- Alexander, D. & Andersen, K. (1993). Gender as a Factor in the Attribution of Leadership Traits. *Political Research Quarterly*, 46(3). <https://doi.org/10.1177/106591299304600305>
- Bauer, N. M. (2015a). Emotional, Sensitive, and Unfit for Office? Gender Stereotype Activation and Support Female Candidates. *Political Psychology*, 36(6), 691–708. <https://doi.org/10.1111/pops.12186>
- Bauer, N. M. (2015b). Who stereotypes female candidates? Identifying individual differences in feminine stereotype reliance. *Politics, Groups, and Identities*, 3(1), 94–110. <https://doi.org/10.1080/21565503.2014.992794>
- Bauer, N. M. (2018). Untangling the Relationship between Partisanship, Gender Stereotypes, and Support for Female Candidates. *Journal of Women, Politics & Policy*, 39(1), 1–25. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2016.1268875>
- Beauvoir, S. de, Capisto-Borde, C., & Malovany-Chevallier, S. (2011). *The second sex* (First Vintage Books ed). Vintage Books.

- Bernstein, M., & Taylor, V. (2022). Identity Politics. Dalam D. Della Porta, B. Klandermans, D. McAdam, & D. A. Snow (Ed.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (1 ed., hlm. 1–5). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm104.pub2>
- Butler, J. (2006). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.
- Campbell, L., & Greenberg, A. (2024). Mental agency and rational subjectivity. *European Journal of Philosophy*, 32(1), 224–245. <https://doi.org/10.1111/ejop.12867>
- Chang, W.-C. (2011). Identity, Gender, and Subjective Well-Being. *Review of Social Economy*, 69(1), 97–121. <https://doi.org/10.1080/00346760902756495>
- Crenshaw, K., Harris, L. C., HoSang, D., & Lipsitz, G. (Ed.). (2019). *Seeing race again: Countering colorblindness across the disciplines*. University of California Press.
- Eagly, A. H., & Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Review*, 109(3), 573–598. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.109.3.573>

- Evans, H. K. (2022). Marketing Female Candidates as "Women": Gender and Partisanship's Influence on Issue Discussion on Twitter in 2020. *Journal of Political Marketing*, 21(3-4), 235-246. <https://doi.org/10.1080/15377857.2022.2099580>
- Fox, R., & Pate, J. (2023). Knowing the Competition: Gender, Qualifications, and Willingness to Run in Elections. *Political Research Quarterly*, 76(2), 725-740. <https://doi.org/10.1177/10659129221113552>
- Friedan, B. (2013). *The feminine mystique*. W. W. Norton & Company.
- Gentry, B. (2018). Political Identity: Meaning, Measures, and Evidence. Dalam B. Gentry, *Why Youth Vote* (hlm. 19-48). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69608-9_2
- Häkli, J., & Kallio, K. P. (2018). On becoming political: The political in subjectivity. *Subjectivity*, 11(1), 57-73. <https://doi.org/10.1057/s41286-017-0040-z>
- Herrick, R. (2016). Gender themes in state legislative candidates' websites. *The Social Science Journal*, 53(3), 282-290. <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2016.05.001>

- Hidayat, B., Chairiyah, S., & Anggraini, D. (2022). Female Candidates Efforts in Winning Legislative Elections: Case Padang City Candidates. *Proceedings of the 1st International Conference on Gender, Culture and Society, ICGCS 2021, 30-31 August 2021, Padang, Indonesia*. Proceedings of the 1st International Conference on Gender, Culture and Society, ICGCS 2021, 30-31 August 2021, Padang, Indonesia, Padang, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.30-8-2021.2316419>
- Karpowitz, C. F., Monson, J. Q., & Preece, J. R. (2017). How to Elect More Women: Gender and Candidate Success in a Field Experiment. *American Journal of Political Science*, 61(4), 927-943. <https://doi.org/10.1111/ajps.12300>
- Kimmel, M. S. (2013). *The gendered society* (Fifth edition). Oxford University Press.
- Lawless, J. L. (2015). Female Candidates and Legislators. *Annual Review of Political Science*, 18(1), 349-366. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-020614-094613>
- Miichi, K. (2023). Indigenizing Islamism in Indonesia: Prosperous Justice Party's Approaches Towards Traditionalist Muslims. *Politics, Religion & Ideology*, 24(1), 120-133. <https://doi.org/10.1080/021567689.2023.2190893>

- Neumann, M., Fowler, E. F., & Ridout, T. N. (2022). Body Language and Gender Stereotypes in Campaign Video. *Computational Communication Research*, 4(1). <https://doi.org/10.5117/CCR2022.1.007>. NEUM
- Norris, P., & Inglehart, R. (2001). Women and Democracy: Cultural Obstacles to Equal Representation. *Journal of Democracy*, 12(3), 126–140. <https://doi.org/10.1353/jod.2001.0054>
- Permata, A.-N. (2016). A Study of the Internal Dynamics of the Prosperous Justice Party and Jamaah Tarbiyah. Dalam K. van Dijk & N. J. G. Kaptein (Ed.), *Islam, Politics and Change*, 29–78. Leiden University Press; JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/jj.1011744.7>
- Prentice, D. A., & Carranza, E. (2002). What Women and Men Should Be, Shouldn't be, are Allowed to be, and don't Have to Be: The Contents of Prescriptive Gender Stereotypes. *Psychology of Women Quarterly*, 26(4), 269–281. <https://doi.org/10.1111/1471-6402.t01-1-00066>
- Prihatini, E. S. (2019a). Corrigendum to "Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position" [Women's Studies International Forum 72 (2018) 40–46]. *Women's Studies International Forum*, 73, 74–76. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2019.01.002>

- Prihatini, E. S. (2019b). Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position. *Women's Studies International Forum*, 72, 40-46. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.10.003>
- Prihatini, E. S. (2020). Islam, Parties, and Women's Political Nomination in Indonesia. *Politics & Gender*, 16(3), 637-659. <https://doi.org/10.1017/S1743923X19000321>
- Purwaningsih, T., & Rubiyati, R. (2019). Political Recruitment of Female Candidates in Meeting the Quota Policy in the Prosperous Justice Party (partai Keadilan Sejahtera) of Diy Province in 2019. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 10(3). <https://doi.org/10.18196/jgp.103108>
- Putri, I. A. (2018). Jaringan Kekerabatan Matrilineal Sebagai Modal Sosial Perempuan Caleg Dalam Pemilu 2014. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 19(2), 167. <https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p167-178.2017>
- Ramadhany, D., & Rahmawati, D. E. (2020). Modal Caleg Perempuan dan Politik Patriarkhi dalam Pemilihan Umum di Indonesia: Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 39-62. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7237>

- Rofhani, R., & Fuad, A. N. (2021). Moderating Anti-Feminism: Islamism and Women Candidates in the Prosperous Justice Party (PKS). *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 156–173. <https://doi.org/10.1177/1868103421989076>
- Rosenwasser, S. M., Rogers, R. R., Fling, S., Silvers-Pickens, K., & Butemeyer, J. (1987). Attitudes toward Women and Men in Politics: Perceived Male and Female Candidate Competencies and Participant Personality Characteristics. *Political Psychology*, 8(2). <https://doi.org/10.2307/3791299>
- Sanbonmatsu, K. (2003). Political Knowledge and Gender Stereotypes. *American Politics Research*, 31(6), 575–594. <https://doi.org/10.1177/1532673X03255167>
- Schneider, M. C. (2014). The Effects of Gender-Bending on Candidate Evaluations. *Journal of Women, Politics & Policy*, 35(1), 55–77. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2014.863697>
- Shams, P. (2020). The Ethics and Politics of Subjectivity. Dalam P. Shams, *Judith Butler and Subjectivity* (hlm. 33–56). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6051-4_3

- Shelton, J. (2023). Gender Identity and Gender Expression. Dalam J. Shelton, *Encyclopedia of Social Work*. NASW Press and Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199975839.013.1324>
- Shihab, N., & Nugroho, Y. (2009). The Ties That Bind: Law, Islamisation and Indonesia's Prosperous Justice Party (PKS). *The Australian Journal of Asian Law*, 10(2).
- Sugeha, A. Z. & Nurfarida, I. (2016). *Perbandingan Kolokasi Kata Ibu dan Bunda dalam Korpus Bahasa Indonesia*. International Seminar on Language Maintenance and Shift (LAMAS) 6.
- Thomsen, D. M., & King, A. S. (2020). Women's Representation and the Gendered Pipeline to Power. *American Political Science Review*, 114(4), 989–1000. <https://doi.org/10.1017/S0003055420000404>
- Wolak, J. (2015). Candidate Gender and the Political Engagement of Women and Men. *American Politics Research*, 43(5), 872–896. <https://doi.org/10.1177/1532673X14547228>

Indeks

A

affirmative action 29, 147,
155

afirmasi 1, 13, 18, 45, 62, 70,
71, 99, 125

C

caleg 15, 30, 31, 32, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 60, 62, 63, 64, 65,
70, 85, 129, 185, 189,
191, 192, 193, 195, 196,
197, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210

D

daerah pemilihan 70, 71, 77,
78, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 95, 96

dana kampanye 43, 51, 56,
57, 59, 60, 62

demokrasi 29, 33, 38, 39, 64,
65, 66, 80, 81, 151, 222,
228, 281

diskriminasi 104, 105, 124,
163, 190, 224

domestik 3, 4, 5, 8, 14, 67,
200, 202, 208, 234, 258

E

elit 12, 13, 15, 16, 19, 33, 35,
39, 45, 51, 54, 160

F

feminin 104, 117, 118, 119,
120, 125, 127, 196, 203,
212, 214

feminis liberal 101, 102,
103, 104, 106, 107, 110,
125, 206, 209, 210

feminis postmodern 108

fragmentasi 147, 158, 168

G

gender 74, 80, 81, 94, 104,
109, 113, 114, 117, 121,
141, 142, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 163, 168,
169, 172, 184, 186, 187,
190, 195, 197, 201, 204,
206, 207, 209, 210, 215,
227, 229, 230, 260, 282

I

identitas 9, 10, 19, 20, 108,
119, 159, 161, 168, 169,
183, 185, 187, 188, 198,
206, 207, 225, 283

ideologi 3, 4, 5, 6, 7, 39, 41,
144, 148, 167, 168, 169,
189, 209, 225

inklusif 142, 149, 158, 160,
171, 172, 188, 202, 205,
207, 210, 223, 224, 225,
227, 228, 229, 230, 235,
258

inklusi sosial 224, 228, 230

interseksional 161, 187

isu perempuan 117, 141,
147, 155, 163, 193

K

kaderisasi 32, 80, 81

kampanye 13, 14, 20, 32, 42,
43, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 59, 60, 62, 64,
184, 185, 188, 189, 190,
192, 193, 194, 195, 197,
198, 200, 202, 203, 204,
206, 207, 208, 209, 210

kandidasi 13, 19, 32, 42, 45,
61, 73

kandidat 2, 11, 13, 14, 16,
40, 45, 75, 82, 105, 120,
144, 150, 161, 195, 198,
204, 205

kebijakan 2, 3, 7, 11, 13, 16,
17, 18, 20, 45, 62, 67,
71, 73, 75, 82, 85, 89,
95, 101, 105, 109, 113,
114, 116, 117, 123, 124,
125, 141, 144, 146, 147,
148, 149, 152, 153, 155,
156, 157, 158, 159, 160,
161, 164, 165, 170, 171,
172, 187, 192, 193, 196,
198, 201, 202, 205, 222,
226, 235, 237, 242, 249,
253, 254, 258, 266

kebijakan afirmasi 45, 62,
71

kekerasan seksual 122, 165,
167, 169

kekuasaan 8, 15, 33, 34, 36,
37, 38, 41, 42, 45, 52,
65, 112, 116, 149, 151,
183, 186, 187

kerentanan 128, 228

kesenjangan 60, 120, 149,
152, 158, 207

kesetaraan 2, 8, 10, 14, 16,
19, 80, 81, 94, 113, 141,
149, 164, 172, 209, 227,
230

keterwakilan 2, 7, 10, 13, 18,
29, 31, 42, 63, 69, 70,
72, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 81, 82, 83, 84, 85,
89, 92, 93, 95, 96, 98,
101, 102, 111, 112, 114,
117, 123, 141, 142, 143,
144, 145, 147, 148, 149,
151, 152, 170, 171, 191

ketidakadilan 125, 163

klientelisme 62, 120
konflik kepentingan 163
kontestasi 15, 169
kota inklusif 18, 21, 224,
 225, 227, 228, 258
kroni 41, 45
kuota 30% 32, 70, 71, 72, 73,
 78, 88, 89

M

marginalisasi 104, 226, 227,
 231
maskulin 103, 105, 118, 120,
 127, 183, 204
massa kritis 145, 146, 170
masyarakat adat 223, 224,
 225, 226, 230, 231, 232,
 233, 236, 237, 238, 240,
 242, 252, 254, 255, 257

O

oligarki 19, 31, 32, 34, 35, 36,
 37, 38, 39, 40, 43, 44,
 64, 65, 67
opresi 9, 103, 105, 107

P

parlemen 1, 2, 7, 11, 12, 15,
 18, 20, 31, 74, 101, 105,
 110, 112, 113, 114, 116,
 117, 118, 119, 121, 122,
 123, 124, 127, 128, 130,
 139, 141, 142, 143, 147,
 148, 149, 150, 152, 155,
 157, 158, 160, 161, 162,
 163, 164, 166, 169, 170,
 172, 239

partai politik 29, 30, 31, 32,
 33, 34, 35, 37, 39, 40,
 41, 42, 43, 44, 46, 47,
 49, 51, 52, 53, 54, 56,
 57, 59, 60, 62, 63, 64,
 67, 70, 71, 73, 75, 76,
 77, 78, 80, 82, 84, 85,
 86, 87, 90, 95, 96, 147,
 191, 282
partisipasi politik 65, 104,
 144, 227, 228, 230
patriarki 31, 33, 143, 148,
 149, 186, 187
patronase 62, 119, 120
pembagian peran 4, 5
pemberdayaan 125, 142,
 150, 151, 163, 207, 209,
 228, 255, 257
pemilihan umum 29, 42,
 183, 190
pendidikan politik 32, 124
perdagangan suara 44
perempuan adat 223, 224,
 225, 226, 228, 230, 231,
 232, 233, 235, 236, 237,
 238, 239, 240, 241, 243,
 250, 252, 253, 254, 256,
 257
perwakilan perempuan 119,
 146, 149, 152, 155, 157,
 158, 171, 200

politik 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
 13, 15, 16, 19, 29, 30,
 31, 32, 33, 34, 35, 37,
 38, 39, 40, 41, 42, 43,
 44, 46, 47, 49, 51, 52,
 53, 54, 56, 57, 59, 60,
 62, 63, 64, 65, 67, 69,
 70, 72, 73, 75, 76, 77,
 78, 80, 81, 82, 84, 85,
 86, 87, 90, 94, 96, 101,
 102, 103, 104, 105, 108,
 109, 113, 114, 121, 122,
 124, 125, 126, 127, 128,
 141, 143, 144, 146, 147,
 148, 149, 150, 151, 152,
 157, 158, 162, 168, 169,
 170, 171, 172, 183, 184,
 185, 186, 187, 188, 190,
 191, 197, 198, 199, 200,
 201, 203, 205, 207, 209,
 210, 224, 225, 227, 228,
 230, 231, 239, 257, 260,
 282, 283
 politik dinasti 52, 158
postmodern 19, 102, 107,
 108, 109, 125, 127
 pragmatis 55, 62, 108, 117
 publik 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 16,
 17, 76, 101, 103, 104,
 112, 113, 116, 122, 127,
 129, 142, 175, 192, 193,
 195, 208, 222, 228, 229,
 261, 264

R

rekrutmen 13, 32, 36, 73, 75,
 80, 81
 representasi deskriptif 114,
 116, 124, 144, 146, 155
 representasi substantif 114,
 116, 118, 145, 146, 147,
 152, 157, 162, 170

Biodata Penulis



Amalinda Savirani merupakan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), Fisipol, UGM. Meraih PhD di Universiteit van Amsterdam, Belanda. Topik gerakan sosial kelompok marjinal (buruh, perempuan, kelompok miskin kota) adalah minat kajiannya. Publikasi dengan topik di atas telah diterbitkan dalam buku dan jurnal internasional dan nasional. Saat ini menjadi kepala unit riset "PolGov", DPP Fisipol UGM.



Dini Suryani adalah Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia merupakan alumni program sarjana Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM yang lulus pada tahun 2010. Ia kemudian mendapatkan gelar Master of Arts - Asia Pacific Studies (with Honours) dari The Australian National University melalui beasiswa Australia Awards (2015). Minat kajiannya meliputi demokrasi, masyarakat sipil, dan tata kelola sumber daya alam. Dalam kurun waktu tiga tahun ini (2022-2024), ia melakukan riset tentang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dampaknya terhadap masyarakat.



Endang Sulastrri merupakan dosen tetap dengan pangkat Lektor Kepala pada Prodi Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Pernah menjabat sebagai Dekan FISIP, Warek I hingga pejabat Rektor di UMJ. Lulus Sarjana dan Doktor (S3) dari Ilmu Politik UGM sedangkan S2-nya diperoleh dari Universitas Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Komisioner KPU RI periode 2007-2012. Fokus kajian yang menjadi perhatiannya adalah partai politik, pemilu, dan gender.



Heroik Mutaqin Pratama adalah seorang peneliti sekaligus *Senior Program Officer* di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau yang lebih dikenal dengan Perludem. Ia menempuh studi sarjana ilmu politik di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2010 dan melanjutkan studi magisternya di Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2020. Sebelum bergabung di Perludem, ia pernah menjadi asisten peneliti di Politics and Governance, Research Center (PolGoV), Departemen Politik dan Pemerintahan, UGM.



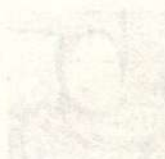
Linda Dwi Eriyanti merupakan seorang dosen di jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu gender dan perempuan. Menyelesaikan studi S2 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM tahun 2012 dan S3 di Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan tahun 2019. Disertasinya diterbitkan oleh UGM Press pada tahun 2021 dengan judul "Perempuan Melawan Kekerasan; Kontestasi Makna, Ruang Pembebasan, dan Solidaritas". Selain mengajar dan melakukan aktivitas penelitian, ia juga aktif dalam berbagai advokasi isu-isu perempuan, baik di dalam maupun di luar kampus, dengan aktif sebagai ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember sejak tahun 2020 hingga saat ini.



Rini Archda Saputri merupakan Dosen Tetap Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung yang lahir di Pekanbaru pada 18 Agustus 1990. Ia menyelesaikan studi Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Politik Universitas Riau pada tahun 2015. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Politik Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Ia tertarik mengkaji perihal perempuan dan politik. Fokus risetnya adalah mengenai representasi politik perempuan di parlemen.



Rofhani Rofhani merupakan dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Lahir di Gresik dan menyelesaikan pendidikan terakhir di Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya di bidang Islamic Studies. Fokus penelitiannya adalah tentang studi perempuan dan budaya politik dalam konteks modern. Isu-isu mengenai identitas Muslim kelas menengah di Indonesia adalah kajian yang sering ditulis. Tahun 2019 ia bergabung dengan Polgov-UGM dan ANU Australia dalam penelitian tentang Women in Legislation 2019, yang di tahun sebelumnya ia menjadi penerima Partnership in Islamic Education Scholarship (PIES) di Australian National University.



BUKU ini mengkompilasi pandangan-pandangan kritis mengenai isu keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan cara pandang pembangunan infrastruktur yang sering tidak sensitif pada kelompok marjinal, khususnya perempuan. Secara garis besar, fenomena tersebut merepresentasikan problematika ketimpangan gender di negeri ini.

Meskipun persentase keterwakilan perempuan terus mengalami kemajuan, tantangan terbesar yaitu budaya patriarki terus mengakar kuat, yakni seperangkat nilai yang memposisikan perempuan tidak penting dibandingkan dengan laki-laki khususnya perannya di ranah publik. Ini misalnya tampak dari beragam aturan turunan kebijakan afirmasi kandidat perempuan yang kerap diubah dan merugikan prinsip afirmasi, termasuk oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, kebijakan afirmasi kandidat perempuan sebanyak 30%, belum diiringi oleh kebijakan dengan semangat yang sama di sektor lain. Akibatnya, kenaikan afirmasi ini belum banyak mengubah ketimpangan gender di sektor lain.

Buku ini terbit untuk merayakan purna tugas Dr. Ratnawati, SU., salah satu dosen perempuan di Departemen Politik Pemerintahan (DPP), Fisipol UGM. Bersama almarhumah Sri Djoharwinarli, Dr. Ratnawati telah turut membuka jalan pada dosen-dosen perempuan di generasi berikutnya di DPP. Mengabdikan sejak tahun 1983, riset-riset Dr. Ratnawati banyak fokus pada kajian tentang politik gender di Indonesia.